



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 2 TAHUN 2020



TENTANG

PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA
BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK
TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar kota secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap, lembaga lainnya dan masyarakat perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Paraf	
CPD	Bag. Hukum
	

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7545);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 218);

Paraf	
010	Bag. Hukum

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
3. Efisiensi penggunaan belanja daerah, dan
4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Tempat kedudukan perjalanan dinas jabatan yaitu menggunakan Pesawat Udara dan/atau melalui moda angkutan darat dengan titik keberangkatan pada tempat kedudukan.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar Tempat Kedudukan;
 - b. penugasan Tenaga Ahli atau Narasumber dari Luar Daerah
 - c. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - d. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - f. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM


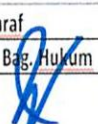
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
3. DPRD adalah Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.
4. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
6. Lembaga lainnya adalah lembaga yang memperoleh anggaran perjalanan dinas dalam bentuk bantuan hibah melalui APBD Kabupaten Pohuwato.
7. Masyarakat adalah masyarakat yang memperoleh anggaran perjalanan dinas melalui APBD Kabupaten Pohuwato.
8. Pejabat yang berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Lembaga, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Badan/Dinas, Camat, dan Kepala Kantor Kabupaten Pohuwato.
9. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

10. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan di Kabupaten Pohuwato menuju tempat tujuan di luar Provinsi Gorontalo yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Lembaga Lainnya.
11. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Pohuwato dan/atau menuju Kabupaten/Kota lain di dalam Provinsi Gorontalo.
12. Surat Perintah Tugas (SPT) adalah dokumen persetujuan pimpinan dan/atau atasan langsung yang memberikan tugas perjalanan dinas.
13. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap, Lembaga Lainnya dan masyarakat.
14. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap, Lembaga Lainnya dan masyarakat.
15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) yang harus dibayarkan sekaligus.
16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sebagai bukti pengeluaran yang sah.
17. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
18. Tempat kedudukan adalah lokasi/tempat/kota dimana satuan kerja berada.
19. Tempat Tujuan adalah lokasi/tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
20. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
21. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
22. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Paraf	
CPD	Bag. Hukum
	

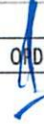

- g. ditugaskan mengikuti pendidikan kedinasan di luar Tempat Kedudukan;
- h. ditugaskan melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, evaluasi dan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/pejabat lainnya/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas termasuk biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah;

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap, lembaga lainnya dan masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar kota harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati atau wakil bupati.
- (2) Dalam hal Bupati dan wakil bupati tidak berada ditempat, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh sekretaris daerah setelah berkonsultasi dengan bupati atau wakil bupati.
- (3) Perjalanan dinas dalam kota diluar kabupaten bagi pejabat eselon II dan eselon III kepala Perangkat Daerah dilakukan atas persetujuan sekretaris Daerah dan diberitahukan kepada Bupati atau wakil bupati.
- (4) Perjalanan dinas dalam kota diluar kabupaten bagi pejabat eselon III dan eselon IV, staf, PTT, Lembaga Lainnya serta Masyarakat dilakukan atas persetujuan Pimpinan Perangkat Daerah dan diberitahukan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atas telaahan staf dan/atau disposisi atas surat dari instansi/lembaga.

Pasal 5

- (1) DPRD yang melakukan perjalanan dinas diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan.
- (2) Instansi/Lembaga yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota atas undangan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati dan wakil bupati tidak berada ditempat, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh sekretaris daerah setelah berkonsultasi dengan bupati atau wakil bupati.

Paraf	
OPD	Bag/Hukum
	

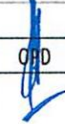
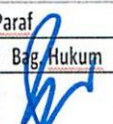
Pasal 7

- (1) Surat Perjalanan Dinas (SPD) diterbitkan dengan ketentuan perjalanan dinas bagi :
- a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Pimpinan DPRD.
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Sekretaris Daerah.
 - d. Pejabat Eselon II b dan Eselon III Kepala Perangkat Daerah ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Sekretaris Daerah.
 - e. Eselon III, Eselon IV, Staf, PTT, Lembaga Lainnya dan Masyarakat ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) SPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Perjalanan dinas dalam kota yang dapat ditanggung minimal 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari.
 - b. Perjalanan dinas luar kota yang dapat ditanggung maksimal 5 (lima) hari.
 - c. Pengecualian dari huruf a dan b adalah perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan dan atau Review oleh Inspektorat Daerah dan/atau perjalanan dinas dalam rangka kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak/Retribusi Daerah dan/atau kegiatan Penelusuran Aset Daerah dan/atau melalui pertimbangan teknis untuk kepentingan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - d. Perjalanan dinas ke luar kota tidak diperkenankan melakukan lebih dari satu kali rute keberangkatan dan kepulangan dalam sekali perjalanan, dan hanya diperhitungkan satu kali biaya tiket.
 - e. Jika perjalanan dinas keluar kota mengharuskan untuk transit lebih dari satu kali dan berakibat biaya tiket melewati *fare rute*, maka biaya tiket diperhitungkan sesuai *fare* yang berlaku saat itu, dengan bukti fisik tiket, boarding pass serta bukti pemindahbukuan (transaksi antar rekening) non tunai atau transaksi melalui teller bank dan dibayarkan sesuai biaya riil yang tertera didalam tiket.

Paraf	
SPD	Bag. Hukum

Pasal 6

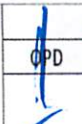

- (1) Atas persetujuan Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pejabat berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Penandatanganan SPT ke luar kota ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 - b. Pejabat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan.
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati. Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat pada lembaga lainnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Pejabat Eselon II b dan Eselon III ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah;
 - f. Pejabat Eselon IV, staf, dan PTT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - g. Jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat lebih dari 1 (satu) hari kerja maka kewenangan penandatanganan SPT dan persetujuan pemberangkatan dilakukan secara berjenjang ke bawah.
- (3) Penandatanganan SPT dalam kota ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 - b. Pejabat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan.
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati. Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat pada lembaga lainnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Pejabat Eselon II b dan Eselon III Kepala Perangkat Daerah ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah;
 - f. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan PTT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - g. Dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah, ditanda tangani oleh Bupati;
 - h. Jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat lebih dari 1 (satu) hari kerja maka kewenangan penandatanganan SPT dilakukan secara berjenjang ke bawah.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

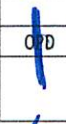
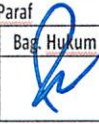
BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kebutuhan uang makan, uang transport lokal dan uang saku yang dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Biaya tiket pesawat dan/atau mobil angkutan umum dan/atau mobil dinas/mobil pribadi, biaya transport terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - b. Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara riil dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening biro perjalanan.
 - c. Biaya taksi perjalanan dinas dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dibayarkan secara lumpsum dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD;
 - d. Dalam hal biaya transport ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi maka biaya yang dapat dibayarkan berupa biaya BBM yang dibayarkan secara riil dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD yang selanjutnya dibayar tunai oleh pelaksana SPD ke SPBU yang dibuktikan dengan struk SPBU.
 - e. Biaya transport dengan menggunakan angkutan umum dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

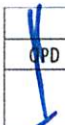
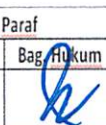
- f. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Fasilitas transport diberikan kepada pejabat yang melaksanakan SPD, diatur dengan ketentuan:
- apabila pejabat yang melaksanakan SPD menggunakan fasilitas transport lebih rendah dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih lebih harus disetor kembali ke kas daerah.
 - apabila fasilitas yang digunakan lebih tinggi dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih kurang menjadi tanggungjawab yang melaksanakan SPD.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- di hotel; atau
 - di tempat menginap lainnya.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana ayat (5) dibayarkan dengan mekanisme pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening manajemen hotel atau penginapan atau biro perjalanan.
- (7) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel yang ditetapkan.
 - Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, DPRD dan Pejabat Eselon II dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak, dan dibayarkan dengan biaya riil yang dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang digunakan dan bukti penerimaan pembayaran oleh sopir kendaraan bersangkutan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (11) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (12) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan kepada 1 (satu) orang pendamping dari Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari keluarga.
- (13) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Kota dan Dalam Kota Dalam Provinsi dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (14) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran III sampai dengan lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di golongankan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati);
 - b. Tingkat B untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon IIb, Ketua/Wakil Ketua TP PKK Tingkat Kabupaten, Pimpinan Lembaga Lainnya;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III, Tim Kerja Pemerintah Daerah, Tim Advokasi Pemerintah Daerah, Kelompok Pakar pada Sekretariat DPRD, Auditor dan Pengawas P2UPD pada Inspektorat Daerah;
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol IV/Gol III, dan Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD;
 - f. Tingkat F untuk PNS Gol. II, I dan CPNS;
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi PTT, dan masyarakat disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil tingkat F.
- (3) PNS Golongan II, Golongan I dan CPNS serta PTT dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat yang bersangkutan.

Paraf	
CPD	Bag. Hukum
	

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran satuan kerja yang menerbitkan SPD bersangkutan
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk diklat dan bentuk panitia/tim setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran satuan kerja berkenaan.

Pasal 11

Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, pejabat lembaga lainnya dan masyarakat dilarang menerima biaya perjalanan dinas dalam 2 (dua) sumber pendanaan atau lebih yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dalam kota dalam kabupaten, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang makan harian dan biaya transport.
- (2) Besaran biaya uang makan harian dan biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum ditransfer ke rekening pelaksana SPD, dengan komponen biaya sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota dalam kabupaten menggunakan kendaraan dinas, maka biaya pengganti transpor diberikan dalam bentuk biaya bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh yang dibayarkan sesuai biaya riil ditransfer ke rekening pelaksana SPD dan dibayarkan tunai ke SPBU dengan bukti struk SPBU.
- (4) Perjalanan dinas dalam kota dalam provinsi dan luar kota, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transport.
 - d. uang representasi; dan
 - e. sewa kendaraan

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibayar secara lumpsum ditransfer ke rekening pelaksana SPD.
- (6) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan mekanisme transfer ke rekening manajemen hotel/penginapan atau biro perjalanan . Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan ditransfer ke rekening pelaksana SPD.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota dalam Provinsi yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, maka biaya pengganti transportasi diberikan dalam bentuk biaya bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh yang dibayarkan sesuai biaya riil ditransfer ke rekening pelaksana SPD dibayarkan tunai ke SPBU yang dibuktikan dengan bill BBM.
- (8) Biaya transport menggunakan angkutan umum dibayarkan secara lumpsum ditransfer ke rekening pelaksana SPD.
- (9) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Lainnya dan Pejabat Eselon II yang melakukan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum dengan mekanisme transfer ke rekening pelaksana SPD.
- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan di luar kota.
- (11) Dalam hal pelaksanaan tugas di tempat tujuan daerah kepulauan maka akan menggunakan sewa kendaraan yang tersedia di daerah setempat dihitung dengan biaya riil tidak mengacu pada lampiran II peraturan bupati ini

Pasal 13

- (1) Khusus untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis dan sejenisnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang biaya ditanggung oleh pihak ketiga dan/atau dibebankan melalui kontribusi kepada pihak ketiga, biaya uang harian yang dapat dibayarkan sebesar 50 % dari uang harian dan 1 (satu) hari biaya perjalanan dinas pada saat kepulangan.

Paraf	
CPD	Bag. Hukum
	

- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan setinggi-tingginya selama 5 (lima) hari pelaksanaan diklat.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pertimbangan teknis oleh kepala SKPD dan rekomendasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (4) Penugasan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) Tingkat I, DIKLATPIM Tingkat II atau DIKLATPIM Tingkat III di luar daerah atau mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Bimbingan Teknis atau sejenisnya yang lamanya melebihi 5 (lima) hari kerja maka pada hari ke 6 (enam) dan seterusnya tidak diberikan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi diberikan uang harian tanpa biaya representasi sebagai berikut:
 - a. Rp 500.000/hari per orang bagi peserta LEMHANAS dan DIKLATPIM Tingkat I;
 - b. Rp 400.000/hari per orang bagi peserta DIKLATPIM Tingkat II;
 - c. Rp 300.000/hari per orang bagi peserta DIKLATPIM Tingkat III; dan
 - d. Rp 200.000/hari per orang bagi peserta Diklat Teknis Fungsional dan Bimbingan Teknis atau sejenisnya.
- (5) Perjalanan dinas dalam kegiatan pemeriksaan dan reviu oleh Inspektorat Daerah dibayar biaya transport sebagaimana point 1 dan biaya uang saku harian sebagaimana point 3 pada Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN

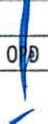

DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, DPRD, PNS, PTT, lembaga lainnya dan masyarakat harus diberikan SPD dari pejabat yang berwenang, menurut format SPD yang telah ditentukan.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan lamanya perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), serta moda transport yang dipergunakan.

Pasal 15

- (1) SPD merupakan bukti, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

Paraf	
010	Bag. Hukum
	

- (2) PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas luar kota, tidak termasuk perjalanan dinas pada Ibukota Provinsi Gorontalo, wajib menyampaikan laporan ringkas tentang perjalanan dinas kepada Pejabat yang berwenang.
- (3) PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pendidikan pelatihan teknis wajib membuat laporan tertulis dalam bentuk karya ilmiah.
- (4) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan. Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf pejabat yang berwenang.
- (5) Perhitungan biaya perjalanan dinas dicatat secara terinci dalam nota perhitungan perjalanan dinas yang dibuat oleh PPTK dan diketahui oleh KPA dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam bentuk kuitansi pembayaran yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran dan pelaksana perjalanan dinas.
- (7) Pada SPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dan tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang di datangi; dan
 - c. tanggal tiba kembali tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (8) Dalam penerbitan SPD, pejabat yang mengeluarkan perintah perjalanan dinas berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.

Pasal 16

- (1) Dalam hal perjalanan dinas luar kota yang menggunakan transportasi udara berlaku ketentuan:
 - a. hari keberangkatan mendahului tanggal keberangkatan yang ditetapkan dalam SPD dan/atau menunda hari kepulangan dari tanggal kepulangan yang ditetapkan dalam SPD tidak mendapatkan tambahan biaya perjalanan dinas;

Paraf	
Ord	Bag. Hukum

- b. perhitungan biaya riil perjalanan dinas luar kota diberikan pada tanggal keberangkatan dan kepulangan sesuai dengan surat perintah tugas.

Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan sebagai berikut:
- pembayaran melalui mekanisme UP/GU/TU; dan
 - pembayaran melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS);
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU yang belum memenuhi bukti pemindahbukuan atau transfer untuk biaya tiket dan hotel maka dapat diberikan panjar sebesar uang harian selama perjalanan yang dipindahbukukan ke rekening pelaksana perjalanan.
- (3) Dalam hal bukti pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank untuk biaya tiket, hotel/penginapan, e-tiket, bill/voucher hotel telah dipenuhi oleh pelaksana SPD maka biaya tiket dan atau hotel/penginapan ditransfer ke rekening pelaksana SPD.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan pembayaran tidak rampung oleh Bendahara Pengeluaran paling lambat tujuh hari setelah kepulangan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksana SPD menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli kepada PA/KPA;
 - PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas pelaksana SPD yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
 - Bukti pengeluaran terdiri dari:
 - E-tiket, bording pass, bukti transfer atas pembayaran tiket berupa struk transfer APMK atau CDM untuk mBanking/iBanking atau print rekening koran untuk transfer dengan sms banking; dan
 - Bill/voucher hotel dan bukti transfer atas pembayaran hotel/penginapan berupa struk transfer APMK atau CDM untuk mBanking/iBanking atau print rekening koran untuk transfer dengan sms banking.
 - Pelaksana SPD menerima pembayaran SPD melalui pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran disertai bukti kuitansi.
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan :
- biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan (tidak rampung), berlaku ketentuan

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

1. E-tiket, bukti transfer atas pembayaran tiket; dan
 2. Bukti transfer atas pembayaran hotel/penginapan.
- b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan (rampung), Bukti pengeluaran terdiri dari:
1. E-tiket, boarding pass, bukti transfer atas pembayaran tiket;
 2. Bill/voucher hotel dan bukti transfer atas pembayaran hotel/penginapan;
 3. SPD rampung/lengkap;
 4. Laporan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas luar daerah atau dalam daerah untuk tujuan monev; dan
 5. Dokumen pendukung lainnya.
- (6) Apabila telah dilakukan pembayaran dan pelaksana SPD kembali sebelum waktu yang ditetapkan dalam SPD, maka selisih biaya perjalanan dinas disetor kembali ke kas daerah.
- (7) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum keberangkatan melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh pelaksana SPD dan disetorkan ke Kas Daerah;
- (8) Apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.

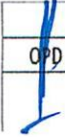

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Pohuwato melalui usulan Pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memaparkan hasil kegiatan yang diikuti dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas adalah :

- (1) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (2) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
- (3) Pertimbangan dari pejabat berwenang dalam bentuk Telaahan Staf;
- (4) Tiket dalam bentuk tiket dan/atau e-tiket, boarding pass, bill atau voucher hotel/penginapan, serta bukti pemindahbukuan atas pembayaran tiket dan hotel ke rekening manajemen hotel/penginapan atau biro perjalanan.
- (5) Laporan pelaksanaan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas luar kota dan perjalanan dinas dalam kota untuk tujuan monev.
- (6) Foto dokumentasi perjalanan dinas minimal 1 foto ditempat tujuan perjalanan dinas Untuk perjalanan dinas luar kota luar provinsi.



Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk keadaan yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.
- (3) Undangan dan/atau permintaan yang berasal dari Lembaga, Yayasan dan non Pemerintah lainnya tidak wajib untuk dipenuhi, kecuali ada pertimbangan lain dari Sekretaris Daerah.
- (4) Pelaksana SPD atau pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kerugian daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan dari yang bersangkutan sehubungan dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (5) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan tuntutan ganti rugi dan/atau tindakan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 21

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku terhadap kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran yang mendatangkan dan atau memberangkatkan dalam belanja transportasi, akomodasi dan uang saku tenaga ahli, narasumber, masyarakat.

Paraf	
CPD,	Bag. Hukum
	

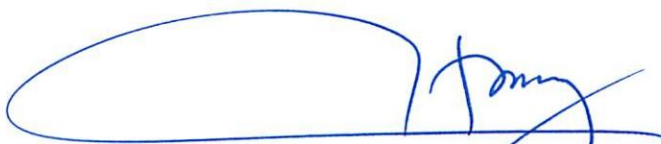
(2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Dana Bantuan Operasional Kesehatan diatur lebih lanjut secara teknis oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2020
WAKIL BUPATI POHUWATO,


AMIN HARAS

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 2

PARAF KOORDINASI					
KABID. 	KEPALA 	KABAG. HUKUM 	AST. BID. 	AST. BID. PEM	SEKDA 

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	URAIAN	TKT A		TKT B			TKT C	TKT D	TKT E	TKT F	Ket
		Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III/ Gol IV	Eselon IV/ Gol III	Gol II/I/CPNS	
1.	DALAM DAERAH DALAM KABUPATEN										
1	Marisa - Paguat										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	75.000	x	75.000	75.000	75.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	
2	Marisa - Buntulia										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	75.000	x	75.000	75.000	75.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	
3	Marisa - Duhiadaa										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	75.000	x	75.000	75.000	75.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	
4	Marisa- Dengilo										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	


NO	URAIAN	TKT A		TKT B			TKT C	TKT D	TKT E	TKT F	Ket
		Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III/ Gol IV	Eselon IV/ Gol III	Gol II/I/CPNS	
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	80.000	x	80.000	80.000	80.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	
5	Marisa - Patilanggio										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	80.000	x	80.000	80.000	80.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	
6	Marisa - Randangan										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	40 ltr	40 ltr	40 ltr	35 ltr	35 ltr	22 ltr	22 ltr	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	100.000	x	100.000	100.000	100.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	
7	Marisa- Taluditi										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	50 ltr	50 ltr	50 ltr	40 ltr	40 ltr	35 ltr	35 ltr	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	175.000	x	175.000	175.000	175.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	
8	Marisa-Wanggarasi										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	50 ltr	50 ltr	50 ltr	40 ltr	40 ltr	35 ltr	35 ltr	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	175.000	x	175.000	175.000	175.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	
9	Marisa - Lemito										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	50 ltr	50 ltr	50 ltr	40 ltr	40 ltr	35 ltr	35 ltr	x	x	Biaya Rill

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

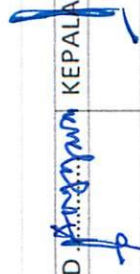


NO	URAIAN	TKT A		TKT B			TKT C	TKT D	TKT E	TKT F	Ket
		Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III/ Gol IV	Eselon IV/ Gol III	Gol II/I/CPNS	
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	175.000	x	175.000	175.000	175.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	
10	Marisa - Popayato Timur										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	60 ltr	60 ltr	60 ltr	50 ltr	50 ltr	35 ltr	35 ltr	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	175.000	x	175.000	175.000	175.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	
	c. Penginapan	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	Biaya Rill
11	Marisa - Popayato										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	60 ltr	60 ltr	60 ltr	50 ltr	50 ltr	40 ltr	40 ltr	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	200.000	x	200.000	200.000	200.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	
	c. Penginapan	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	Biaya Rill
12	Marisa - Popayato Barat										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	60 ltr	60 ltr	60 ltr	50 ltr	50 ltr	40 ltr	40 ltr	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	300.000	x	300.000	300.000	300.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000	
	c. Penginapan	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	Biaya Rill
2	DALAM DAERAH ANTAR DESA DALAM KECAMATAN										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	x	x	x	x	x	x	10 ltr	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	x	x	100.000	50.000	50.000	Lumpsum

NO	URAIAN	TKT A		TKT B			TKT C	D	TKT E	TKT F		Ket
		Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD				Eselon II	Eselon III/ Gol IV	
3	KHUSUS SATUAN UANG SAKU DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT DAERAH DAN PERJALANAN DINAS TP4D											
	Uang Harian	x	x	x	x	x	400.000	350.000	250.000	200.000	Lumpsum	
	- Uang saku Harian	x	x	x	x	x	400.000	350.000	250.000	200.000		

WAKIL BUPATI POHUWATO



AMIN HARAS

PARAF KOORDINASI				
KABID 	KABAG HUKUM 	AST. BID. Hal 4 dari 4	AST. BID. PEM	SEKDA 

Lampiran II Peraturan Bupati Pohnuato

Nomor :

Tanggal :

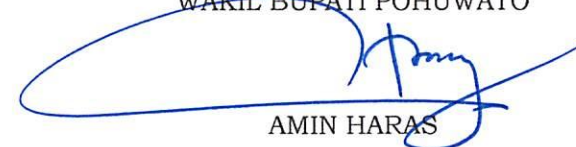
Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DILUAR PROVINSI DAN DALAM KOTA DALAM PROVINSI

NO	URAIAN	Tkt A		Tkt B			Tkt C	Tkt D	TKT E	TKT F	Ket
		Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III	Eselon IV/ Gol IV/ Gol III	Gol II/I/CPNS	
1	LUAR KOTA DILUAR PROVINSI GORONTALO										
	A. Luar Kota Luar Sulawesi										
	a. biaya transport										
	- Biaya Tiket	Bisnis	Bisnis	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Biaya Rill
	- Biaya Transport ke Bandara (PP)	Mengikuti Satuan Biaya Transport atau Biaya Pengganti Transport									Biaya Rill
	- Biaya taksi perjalanan dinas	x	x	Mengikuti satuan Biaya Taksi Kota Tujuan						Lumpsum	
	b. Uang Harian	Mengikuti Satuan Biaya Uang Harian									Lumpsum
	c. Penginapan	Mengikuti Satuan Penginapan Kota Tujuan									Biaya Rill
	d. Refresentasi	Mengikuti Satuan Biaya Uang Representasi									Lumpsum
	e. Sewa Kendaraan	2.000.000	1.750.000	x		x	x	x	x	x	Biaya Rill (khusus pejabat negara)
	f. Biaya Pemetian jenazah	15.000.000									
	B. Luar Kota Dalam Sulawesi										
	a. biaya transport (PP)										
	Biaya Tiket	Bisnis	Bisnis	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Biaya Riil
	Biaya Transport ke Bandara (PP)	Mengikuti Satuan Biaya Transport atau Biaya Pengganti Transport									Biaya Riil
	Biaya Transport Kendaraan Darat	Mengikuti Satuan Biaya Transport atau Biaya Pengganti Transport (BBM)									Biaya Riil
	Biaya taksi perjalanan dinas	x	x	Mengikuti satuan Biaya Taksi Kota Tujuan						Lumpsum	
	b. Uang Harian	Mengikuti Satuan Biaya Uang Harian									Lumpsum
	c. Penginapan	Mengikuti Satuan Penginapan Kota Tujuan									Biaya Riil
	d. Refresentasi	Mengikuti Satuan Biaya Uang Representasi									Lumpsum

NO	URAIAN	Tkt A		Tkt B			Tkt C	Tkt D	TKT E	TKT F	Ket
		Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III	Eselon IV/ Gol IV/ Gol III	Gol II/I/CPNS	
	e. Sewa Kendaraan	1.500.000	1.250.000	x			x	x	x	x	Biaya Riil (khusus pejabat negara)
2	ANTAR DAERAH DALAM PROVINSI GORONTALO										
	a Transport Darat	Mengikuti Satuan Biaya Transport atau Biaya Pengganti Transport (BBM)									Biaya Riil
	b. Uang Harian	Mengikuti Satuan Biaya Uang Harian									Lumpsum
	c. Penginapan	Mengikuti Satuan Biaya Penginapan									Biaya Riil
	d. Uang representasi	Mengikuti Satuan Biaya Uang Representasi									Lumpsum

WAKIL BUPATI POHUWATO


AMIN HARAS

PARAF KOORDINASI				
KABID.  KEPALA	KABAG. HUKUM 	AST. BID. 	AST. BID. PEM	SEKDA 

Lampiran III Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2020.


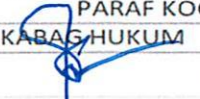
KOMPONEN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN		Tkt A		Tkt B			Tkt C	Tkt D	TKT E	TKT F
			Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III	Eselon IV/ Gol IV/ Gol III	Gol II/I/CPNS
1	Uang Harian	Dalam Daerah Kabupaten	800.000	700.000	700.000	650.000	600.000	400.000	300.000	200.000	150.000
		Dalam Daerah Dalam Provinsi	1.500.000	1.200.000	900.000	850.000	800.000	650.000	600.000	500.000	350.000
		Luar Daerah Dalam Sulawesi	2.500.000	2.000.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000	1.450.000	1.100.000	850.000	750.000
		Luar Daerah Luar Sulawesi	3.500.000	3.000.000	1.950.000	1.900.000	1.850.000	1.750.000	1.700.000	1.200.000	1.100.000
2	Uang Representasi	Dalam Daerah Dalam Provinsi	750.000	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000	x	x	x
		Luar Daerah Dalam Sulawesi	1.250.000	1.150.000	1.000.000	900.000	800.000	500.000	x	x	x
		Luar Daerah Luar Sulawesi	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.150.000	1.100.000	650.000	x	x	x

WAKIL BUPATI POHUWATO



AMIN HARAS

PARAF KOORDINASI					
KABID	KEPALA	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA
					

Lampiran IV Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

KOMPONEN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

No	Kota Tujuan	Satuan	Tkt A		Tkt B			Tkt C	Tkt D	TKT E	TKT F
			Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III	Eselon IV/ Gol IV/ Gol III	Gol II/I/ CPNS
1	ACEH	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	900.000	500.000	400.000
2	SUMATERA UTARA	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	900.000	500.000	400.000
3	RIAU	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	900.000	500.000	400.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	900.000	500.000	400.000
5	JAMBI	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	900.000	500.000	400.000
6	SUMATERA BARAT	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	900.000	500.000	400.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	900.000	500.000	400.000
8	LAMPUNG	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	900.000	500.000	400.000
9	BENGKULU	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	900.000	500.000	400.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.100.000	900.000	600.000	500.000
11	BANTEN	OH	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.100.000	900.000	600.000	500.000
12	JAWA BARAT	OH	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.100.000	900.000	600.000	500.000
13	DKI JAKARTA	OH	7.250.000	4.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.100.000	700.000	500.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.100.000	900.000	600.000	500.000
15	D.I YOKYAKARTA	OH	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.100.000	900.000	600.000	500.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.100.000	900.000	600.000	500.000
17	BALI	OH	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.100.000	900.000	600.000	500.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	600.000	500.000	400.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	600.000	500.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	600.000	500.000	400.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	600.000	500.000	400.000

Paraf	
OPD	Bag. Huk

22	KALIMANTAN SELATAN	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	600.000	500.000	400.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	600.000	500.000	400.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	600.000	500.000	400.000
25	SULAWESI UTARA	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	700.000	500.000	400.000
26	GORONTALO	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	700.000	500.000	400.000
27	SULAWESI BARAT	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	700.000	500.000	400.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	700.000	500.000	400.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	700.000	500.000	400.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	1.000.000	700.000	500.000	400.000
31	MALUKU	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
32	MALUKU UTARA	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
33	PAPUA	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
34	PAPUA BARAT	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000

WAKIL BUPATI POHUWATO

AMIN HARAS

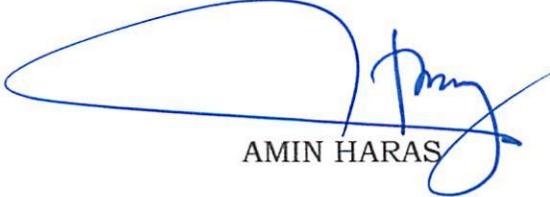
PARAF KOORDINASI					
KABID	KEPALA	KABAG HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA

Lampiran VI Peraturan Bupati Pohuwato
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

KOMPONEN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Tujuan	Satuan	Jumlah
1	ACEH	Orang/Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3	RIAU	Orang/Kali	70.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	105.000
5	JAMBI	Orang/Kali	128.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	192.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	124.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	148.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	92.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	86.000
11	BANTEN	Orang/Kali	300.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	118.000
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	300.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	50.000
15	D.I YOKYAKARTA	Orang/Kali	141.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148.000
17	BALI	Orang/Kali	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	218.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	81.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	145.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	94.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	141.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	401.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	310.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	200.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	128.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	151.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	332.000
31	MALUKU	Orang/Kali	340.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	403.000
33	PAPUA	Orang/Kali	354.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130.000

WAKIL BUPATI POHUWATO


AMIN HARAS

PARAF KOORDINASI					
KABID ...	KEPALA	KABAG HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA
					

Lampiran V Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

KOMPONEN BIAYA MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

No	Daerah	Tingkat A		Tingkat B			Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Tingkat F	Ket	Menggunakan Angkutan Umum
		Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda / Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf		
A	TRANSPORT UDARA/TIKET	<i>Bisnis</i>	<i>Bisnis</i>	<i>Ekonomi</i>	<i>Ekonomi</i>	<i>Ekonomi</i>	<i>Ekonomi</i>	<i>Ekonomi</i>	<i>Ekonomi</i>	<i>Ekonomi</i>	Biaya Riil	
B	TRANSPORT DARAT											
1	Marisa - Boalemo	x	x	700.000	500.000	500.000	450.000	300.000	300.000	300.000	Biaya Riil	200.000
2	Marisa - Limboto	x	x	1.000.000	800.000	800.000	800.000	500.000	500.000	500.000	Biaya Riil	400.000
3	Marisa - Kota Gorontalo	x	x	1.000.000	800.000	800.000	800.000	500.000	500.000	500.000	Biaya Riil	400.000
4	Marisa - Gorut	x	x	1.000.000	800.000	800.000	800.000	500.000	500.000	500.000	Biaya Riil	400.000
5	Marisa - Bone Bolango	x	x	1.000.000	800.000	800.000	800.000	500.000	500.000	500.000	Biaya Riil	400.000
6	Marisa - Bolaang Mongondow	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Biaya Riil	800.000
7	Marisa - Minahasa	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	Biaya Riil	1.000.000
8	Marisa - Kota Manado	3.450.000	3.450.000	3.450.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	Biaya Riil	1.000.000
9	Marisa - Bitung	4.600.000	4.600.000	4.600.000	3.737.500	3.737.500	3.737.500	3.162.500	3.162.500	3.162.500	Biaya Riil	1.200.000
10	Marisa - Kecamatan Moutong	1.250.000	1.250.000	1.250.000	900.000	900.000	900.000	700.000	700.000	700.000	Biaya Riil	400.000
11	Marisa - Parigi Moutong	2.012.500	2.012.500	2.012.500	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	Biaya Riil	800.000
12	Marisa - Palu	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	Biaya Riil	1.000.000

WAKIL BUPATI POHUWATO

AMIN HARAS

PARAF KOORDINASI					
KABID	KEPALA	KABAG HUKUM	AST. BID	AST. BID. PEM	SEKDA

Lampiran VIII Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : Januari 2020

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :(PA/KPA)

N I P :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, perjalanan dinas luar kota berdasarkan surat perintah tugas nomor.....tanggal.....dan SPD nomor.....tanggal.....an :

N a m a :(pelaksana SPD)

N I P :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dibatalkan sesuai surat pernyataan pembatalan perjalanan dinas Nomor.....Tanggal....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, maka biaya :

a.

b.

Yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan / *refund* (sebagian/seluruh) sebesar Rp.....
(.....)

Sehingga dibebankan pada rekening anggaran.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian tersebut ke kas negara.

Marisa,.....

Yang membuat pernyataan,

.....

NIP

WAKIL BUPATI POHUWATO,

AMIN HARAS

PARAF KOORDINASI					
KABID.	KEPALA	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA

Lampiran VII Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : Januari 2020

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :(Pejabat penerbit SPD)

N I P :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, tugas perjalanan dinas luar kota dari :

N a m a :(pelaksana SPD)

N I P :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu :(alasan pembatalan perjalanan dinas).

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksana perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Marisa,.....

Yang membuat pernyataan,

.....

NIP

WAKIL BUPATI POHUWATO,

AMIN HARAS

PARAF KOORDINASI					
KABID ...	KEPALA	KABAS HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA